

**AKAR PEMASALAHAN TERORISME DI INDONESIA  
MATA KULIAH TERORISME DI INDONESIA**

**Interaksi Kondisi Domestik dan Situasi Internasional Masa Orde Baru sebagai  
Penyebab Aksi Terorisme di Indonesia**



**Ni Putu Elvina Suryani (1106146013)**

**PROGRAM MAGISTER  
KAJIAN TERORISME DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2012**

## I. Pendahuluan

Terorisme adalah permasalahan yang kompleks. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari upaya para ahli untuk menguraikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya dan dari beragam definisi tersebut, tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia. Kompleksitas juga muncul karena faktanya, label 'terorisme' digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkup yang luas.<sup>1</sup>

Di beberapa negara, terorisme identik dengan aktivitas kelompok revolusioner ekstrim kiri seperti Brigadir Merah di Italia, ataupun kelompok ekstrim kanan seperti Neo-Nazi dan *Skinheads* di Eropa.<sup>2</sup> Di sisi lain, dengan munculnya kelompok seperti al Qaeda, basis religius juga menjadi bagian dari variasi identifikasi mengenai kelompok teroris, khususnya yang terjadi dalam dasawarsa terakhir. Sebagai salah satu kelompok teroris, Al Qaeda juga menjadi semakin signifikan ketika dengan basis religiusnya, kelompok ini diduga memiliki jaringan global yang luas dan menjadi ancaman internasional.

Keberadaan al Qaeda juga menjadi pemicu munculnya klaim bahwa fenomena terorisme adalah fenomena global yang muncul akibat jaringan al Qaeda di berbagai negara. Al Qaeda yang sejak peristiwa 9/11 menjadi kelompok teroris yang diduga terkait dengan berbagai kelompok terorisme di seluruh dunia serta menyebabkan aksi-aksi terorisme dalam lingkup internasional. Seperti misalnya peristiwa pengeboman di kota London 7 Juli 2005 sebagai salah satu aksi terorisme besar di Eropa yang pelakunya dikaitkan dengan al Qaeda dan afiliasinya.<sup>3</sup> Selain itu, kelompok Laskar e-Toiba, yang menurut pihak berwenang menjadi dalang dibalik aksi terorisme Mumbai tahun 2008 di India juga merupakan kelompok yang diasosiasikan dengan al Qaeda.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tore Bjorgø (ed.), *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward* (London and New York: Routledge, 2005), hlm. 1

<sup>2</sup> James M. Lutz dan Brenda J. Lutz, *Global Terrorism*, (London:Routledge, 2004)

<sup>3</sup> Mitchell D. Silber, dan Arvin Bhatt, (2007), *Radicalization in the West*

<sup>4</sup> Eben Kaplan dan Jayshree Bajoria, "Counterterrorism in India," Council on Foreign Relations, 2008,

diunduh dari <http://www.cfr.org/india/counterterrorism-india/p11170>, diakses pada tanggal 19 November 2012

Di Indonesia sendiri, terorisme dikaitkan dengan keberadaan kelompok Jemaah Islamiyah (JI), kelompok radikal Islam yang dianggap menjadi ancaman serius bagi keamanan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia terkait dengan identifikasi anggota JI sebagai otak dan pelaku aksi-aksi terorisme di Indonesia oleh pihak kepolisian antara tahun 2000-2005 seperti Bom Natal tahun 2000, 81 bom dan 29 peledakan di Jakarta pada tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Bom Marriot tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004 serta Bom Bali II tahun 2005.<sup>5</sup> Beberapa pihak mengklaim bahwa JI juga merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al Qaeda dan bahwa aksi terorisme di Indonesia seperti Bom Bali I tahun 2002 merupakan aksi terorisme terorganisir yang menggunakan *style* ala al Qaeda.<sup>6</sup>

Namun dalam memahami akar permasalahan terorisme, kemunculan dari kelompok-kelompok teroris tidak hanya disebabkan oleh satu faktor akan tetapi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik melalui pendekatan struktural maupun individu, faktor-faktor yang muncul beragam, dan kemunculan kelompok teroris ataupun aksi terorisme besar dari interaksi antara faktor-faktor tersebut. Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok JI dalam kasus ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor afiliasi dengan al Qaeda semata. Bukan hanya faktor internasional, tetapi faktor-faktor lain seperti kondisi domestik juga berpengaruh dalam munculnya terorisme di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sukawarsini Djelantik, "Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorists." *International Graduate Student Conference Series*, No. 22, (East-West Center, 2006), hlm. 2

<sup>6</sup> Klaim ini muncul salah satunya dari perwakilan Singapura untuk PBB, Kishore Mahbubani, yang meminta JI dimasukkan sebagai kelompok teroris yang berafiliasi dengan al Qaeda dalam Security Council Resolution 1267. Kemudian Greg Barton dalam konferensi Security Cooperation and Governance in Southeast Asia: Responding to Terrorism, Insurgency and Separatist Violence in Indonesia, Thailand and the Philippines mengatakan bahwa aksi terorisme Bom Bali I tahun 2002 adalah aksi terorisme terorganisir yang menggunakan *style* ala al Qaeda. Analisis terorisme Clive Williams juga memberikan tipologi "hubungan" antara al Qaeda dan terorisme di Asia Tenggara sebagai gambaran bagaimana JI dan al Qaeda memiliki koneksi. Selengkapnya dalam ICG, "Indonesia Backgrounder: How the *Jemaah Islamiyah* Terrorist Network Operates," *Asia Report* N°43, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2002), hlm. 1; Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) dan Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), "Security Cooperation and Governance in Southeast Asia: Responding to Terrorism, Insurgency and Separatist Violence in Indonesia, Thailand and the Philippines," *Conference Report*, (Singapore, 2006), hlm. 4 dan Kumar Ramakhrisna & See Seng Tan, "Is Southeast Asia a "Terrorist Haven"?" dalam Kumar Ramakhrisna & See Seng Tan, eds., *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, (Singapore: World Scientific/IDSS, 2002), hlm. 7

Makalah ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena terorisme di Indonesia (yang terkait dengan kelompok JI) bisa muncul. Dengan mempercayai bahwa kemunculan dari kelompok teroris tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja (seperti faktor al Qaeda) akan tetapi oleh beberapa faktor yang berinteraksi satu sama lain, makalah ini akan mencoba menjelaskan bahwa interaksi kondisi domestik dan internasional pada masa Orde Baru berperan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terorisme di Indonesia. Dengan melihat kondisi domestik dan internasional sebagai sebuah interaksi daripada faktor-faktor yang terpisah, diharapkan akan lebih memperjelas bagaimana fenomena terorisme muncul dan berkembang di Indonesia.

Orde Baru kemudian dipilih sebagai rentang waktu pembahasan karena pada periode inilah kondisi-kondisi baik domestik maupun internasional muncul dan mempengaruhi perkembangan terorisme di Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, peredaman aspirasi maupun aksi-aksi sosial oleh pemerintahan yang represif menjadi ladang yang subur bagi bangkitnya gerakan-gerakan melawan ketidakbebasan dari represi pemerintah. Situasi internasional pada periode ini juga menjadi faktor penting dalam perkembangan terorisme di Indonesia dengan adanya pengaruh perjuangan Afganistan serta perkembangan jihad global masa Perang Dingin sekitar tahun 1980-an. Selain itu, beberapa peristiwa spesifik sesaat pasca Orde Baru juga akan dilibatkan dalam pembahasan sebagai faktor pemicu yang pada akhirnya mendorong terjadinya aksi terorisme di Indonesia, khususnya yang terjadi antara tahun 2000 hingga 2005.

## **II. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini akan berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut: **“Bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru berperan sebagai penyebab terorisme khususnya aksi terorisme oleh anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia?”**

## **III. Kerangka Teori**

Dalam pembahasan selanjutnya, diperlukan kerangka teori untuk membantu menganalisis permasalahan yang akan dijawab. Makalah ini mengambil tema akar permasalahan terorisme di Indonesia, oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan akan

mengulas beberapa teori yang muncul untuk memahami apa sebenarnya akar permasalahan dari terorisme tersebut.

Teori mengenai akar permasalahan terorisme adalah salah satu topik hangat terkait dengan bagaimana fenomena terorisme dapat muncul dan berkembang. Teori strukturalis misalnya, merupakan salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah konflik dapat muncul di suatu masyarakat. Fokus utama dari teori strukturalis adalah melihat faktor-faktor pendukung dari sebuah masyarakat (struktur) yang harus diperhatikan pemerintah suatu negara demi menjaga keamanan nasionalnya. Faktor-faktor tersebut antara lain persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk (*civil protections*), kebebasan (*freedom*) atau beberapa faktor yang lain.<sup>7</sup> Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidakpedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Selain teori strukturalis, teori *relative deprivation* (RD) dan teori *absolute deprivation* (AD) juga digunakan untuk memahami asal mula terorisme.<sup>8</sup> Teori RD yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr berfokus pada hubungan antara frustrasi dan agresi yang dimiliki individu menjadi dasar dalam melakukan tindakan terhadap subyek yang menjadi sumber frustrasi mereka. Sedangkan teori AD menyebutkan bahwa jika suatu kelompok telah diabaikan kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup oleh pemerintah atau sistem sosial, mereka akan bergerak melakukan kekerasan politik.

Selain teori-teori di atas, terdapat pula indikator-indikator spesifik yang dapat menjadi faktor menyebarnya gerakan terorisme.<sup>9</sup> Bagi kelompok teroris, ladang yang subur untuk dapat menyebarkan paham terorismenya adalah ketika mereka berada di sebuah kondisi masyarakat yang secara ekonomi dan sosial terjadi kesenjangan, sehingga dari kondisi ini muncul beberapa fenomena seperti kemiskinan, rendahnya pelayanan terhadap masyarakat

---

<sup>7</sup> Joshua Sinai, "New Trends in Terrorism Studies: Strengths and Weakness," dalam Magnus Ranstorp, *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 36

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

terutama masyarakat ekonomi lemah, tidak adanya persamaan hak asasi manusia di mata politik, serta kurangnya akses terhadap pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih cepat menerima doktrinasi paham terorisme. Adapun faktor politis lain yang mendukung perkembangan paham terorisme adalah bagaimana sebuah kelompok teroris mengeksploitasi kondisi politik yang kacau dalam suatu pemerintahan negara yang lemah (*weak states*) atau negara yang gagal (*failed states*).<sup>10</sup>

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim, di sisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.<sup>11</sup>

Dari sekian literatur yang membahas mengenai akar permasalahan terorisme seperti di atas, makalah ini akan menggunakan tipologi penyebab terorisme oleh Tore Bjørgo untuk membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan. Tipologi oleh Bjørgo ini dipilih karena dapat digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang berperan dalam kemunculan aksi terorisme secara terstruktur dan kronologis. Dimulai dengan faktor prekondisi hingga pemicu, penggunaan tipologi penyebab terorisme oleh Bjørgo dapat membantu menganalisis interaksi kondisi domestik dan situasi internasional yang menyebabkan aksi terorisme di Indonesia dalam kerangka sejarah, yakni masa Orde Baru.

### **3.1 Tipologi Penyebab Terorisme Bjørgo**

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjørgo menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjørgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Rommel C. Bonlai, "The War on Terrorism in Southeast Asia," 2003, dalam Asep Chaerudin, "Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines," *Tesis*, (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003), hlm. 23

fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut:<sup>12</sup>

❖ **Faktor penyebab struktural**, yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjørgo antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.

❖ **Faktor penyebab fasilitator (akselerator)**, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb.

❖ **Faktor penyebab motivasional**, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.

❖ **Faktor pemicu**, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Dengan menggunakan tipologi di atas, makalah ini akan berusaha menjawab bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru dapat berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Makalah ini membatasi lingkup pembahasan pada kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga

---

<sup>12</sup> Tore Bjørgo (ed.), *Ibid.*, dalam Artanti Wardhani, *Modul Pengajaran Mata Kuliah Terorisme di Indonesia*, (Universitas Indonesia, 2011)

2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok JI melakukan aksi terorisme muncul.

#### **IV. Pembahasan**

Bagian ini akan memuat pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terorisme pada masa Orde Baru, yakni faktor struktural, fasilitator, motivasional dan pemicu. Pembahasan faktor-faktor ini merujuk pada kondisi domestik masa Orde Baru sebagai faktor struktural dan situasi internasional masa Orde Baru yang menyediakan faktor fasilitator dan motivasional serta bagaimana kondisi domestik dan internasional tersebut berinteraksi sehingga berpengaruh terhadap perkembangan aksi terorisme di Indonesia dengan dipicu oleh peristiwa-peristiwa spesifik pada tahun 1998-2001.

##### **4.1 Faktor Struktural: Kondisi Domestik Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, kondisi domestik yang menjadi prekondisi untuk melahirkan terorisme adalah atmosfer represi politik yang dilakukan oleh rezim Soeharto terhadap gerakan-gerakan politik, termasuk represi terhadap gerakan politik Islam. Masa Orde Baru merupakan periode politik tahun 1966-1998 ketika Soeharto berkuasa sebagai presiden RI menggantikan Soekarno.<sup>13</sup> Periode ini kental dengan nuansa politik yang represif oleh rezim Orde Baru yang melakukan penekanan-penekanan terhadap berbagai aktor penyeimbang dan pengawas lembaga publik seperti kelompok kepentingan, LSM, organisasi profesi bahkan partai politik dengan alasan untuk mempertahankan stabilitas negara.<sup>14</sup> Gerakan politik Islam merupakan bagian dari aktor-aktor yang ditekan sebagai bagian dari represi politik Orde Baru tersebut.

Salah satu pergerakan politik Islam yang ditekan adalah pergerakan kelompok yang dianggap sebagai ancaman sejak sebelum masa Orde Baru, yaitu Darul Islam (DI). DI merupakan kelompok Islamis pada era tahun 1950-an yang memiliki sejarah pemberontakan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). DI menganggap pemerintah Indonesia patut diperangi sebagai

---

<sup>13</sup> Presiden Soeharto baru menjadi presiden secara sah pada tahun 1968, namun presiden sebelumnya, Soekarno, telah mengalihkan kekuasaannya pada Soeharto secara efektif sejak tahun 1966. Dikutip dari ICG, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia," *Indonesia Briefing*, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2002), hlm. 5

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007)



jihad (perang) karena pemerintah Indonesia dipandang tidak menegakkan syari'at Islam dan melegalkan aksi kekerasan sebagai bagian dari jihad. Kelompok ini juga membenarkan aksi teror terhadap kaum sipil yang tidak mendukung mereka<sup>15</sup> dan dianggap sebagai cikal bakal gerakan salafy jihadi di Indonesia.<sup>16</sup>

Pada masa Orde Baru, pergerakan kelompok DI meredup, khususnya pasca kematian Kartosuwirjo, pemimpin kelompok tersebut. Usaha untuk menghidupkan kembali kelompok DI baru muncul pada tahun 1970-an. Terinspirasi oleh pesan terakhir Kartosuwirjo yang menyebutkan bahwa perjuangan DI pada waktu itu memasuki fase Hudaibiyah, periode perjanjian gencatan senjata sebelum pasukan Islam berhasil menaklukkan kota Mekkah pada masa perjuangan Nabi Muhammad, orang DI percaya bahwa DI akan bangkit dan kemenangan sudah dekat.<sup>17</sup> Orang-orang DI ingin kembali mewujudkan keinginan Kartosuwirjo untuk membentuk negara Islam Indonesia dan menegakkan syariat Islam.<sup>18</sup> Pengorganisasian diri orang-orang mantan DI dari Jawa, Sumatra dan Sulawesi dilakukan dan pencarian bantuan senjata dari Libya juga dicoba, namun digagalkan oleh aparat keamanan ketika pada awal tahun 1977 penangkapan besa-besaran terhadap orang DI dilakukan.<sup>19</sup>

Pasca penangkapan, beberapa petinggi DI berhasil lolos dan memulai pergerakan baru. Namun lagi-lagi aparat keamanan berhasil mencium jejak pergerakan mereka dan pada tahun 1981 kembali melakukan penangkapan sejumlah besar petinggi DI. Setelah beberapa aksi penangkapan petinggi DI tersebut, gerakan politik Islam DI merekrut dua tokoh penting, yakni Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Kedua tokoh ini sebelumnya adalah bagian

---

<sup>15</sup> Solahudin, *Nil Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 3

<sup>16</sup> Salafy jihadi atau salafy jihadisme adalah paham yang memadukan paham salafy atau neo-wahhabi dengan ajaran jihad, dan menempatkan jihad sebagai ibadah yang utama setelah keimanan. Salafy Islam menginginkan pembersihan Islam dari pengaruh luar dan mengembalikan Islam pada praktek menurut "leluhur saleh" yakni Muhammad dan komunitas Muslim terdahulu. Salafy jihad memadukan paham salafy tersebut dengan interpretasi mengenai jihad, yakni perang melawan pendudukan orang kafir di tanah-tanah kaum muslimin yang merupakan hukum wajib bagi umat Islam dengan pembenaran terhadap aksi terorisme. selengkapnya dalam Rogelio Alonso, et.al. *Radicalisation Processes: Leading to Acts of Terrorism*, (European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation, 2008); dan Artanti Wardhani, *Op. Cit.*

<sup>17</sup> Solahudin, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 3

dari anggota Muhammadiyah dan simpatisan Partai Masyumi, dua saluran politik bagi kelompok Islam pada tahun 1950-an.<sup>20</sup> Namun rezim Orde Baru bertindak represif terhadap partai politik Islam dengan menyingkirkan Muhammadiyah serta Partai Masyumi dari arena politik sehingga menyumbat aspirasi politik kelompok Islam tersebut. Karena itulah kemudian sebagian dari anggota dan simpatisan mereka bergabung bersama DI untuk mewujudkan tujuan mereka membangun negara Islam.

Pada tahun 1985, rezim Orde Baru menetapkan Undang-Undang (UU) yang memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.<sup>21</sup> Melalui undang-undang ini, pemerintah Orde Baru beranggapan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia dapat mengurangi potensi perpecahan akibat perbedaan ideologi dan dapat menciptakan stabilitas negara untuk mengamankan proses pembangunan nasional.<sup>22</sup> Beberapa kelompok dan organisasi di Indonesia menerima undang-undang ini karena posisi dan daya tawar mereka yang lemah jika dibandingkan dengan pemerintah dan penerimaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan posisi mereka. Partai PPP adalah salah satu contoh organisasi tersebut. Sebagai partai politik Islam yang berfungsi hanya sebagai penyeimbang demokrasi bagi partai politik terbesar milik pemerintah Orde Baru, Partai Golkar, PPP menerima asas tunggal Pancasila agar tetap memiliki eksistensi di dunia perpolitikan pada masa itu.<sup>23</sup>

Organisasi keagamaan yang juga menerima asas Pancasila ini adalah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Meskipun merupakan organisasi yang berasaskan agama, NU menerima undang-undang asas tunggal Pancasila karena beberapa alasan, antara lain karena beranggapan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak akan menggantikan Islam sebagai agama, sila pertama dalam Pancasila yang sebenarnya mencerminkan *tauhid* (Tuhan yang satu) Islam dan bahwa Pancasila tidak akan merusak aqidah ke-Islaman NU karena Pancasila merupakan semangat nasionalitas, bukan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Merujuk pada UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kutipan dalam *Ibid.*, hlm. 5

<sup>22</sup> Achmad Kemal Riza, "Responses of Islamic Organisations to the Enactment of Pancasila as Asas Tunggal for Mass Organisations in Indonesia," *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, (2008), 374-394, hlm. 374-375

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 375

keagamaan.<sup>24</sup> Posisi afirmatif NU ini juga dilandaskan pada prinsip bahwa wacana NU tidak lagi berjalan di jalur politis, namun lebih mengutamakan prinsip sebagai organisasi sosial keagamaan yang memberdayakan umatnya.<sup>25</sup>

Namun persetujuan terhadap undang-undang asas tunggal Pancasila ini tidak terjadi pada kelompok yang lebih ekstrim seperti DI (yang pada waktu itu disebut Komando Jihad). DI menjadi kelompok yang menolak undang-undang yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi karena orang-orang DI kukuh dengan tujuan membentuk negara Islam dan menganggap bahwa pengakuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara adalah sebuah kemusyrikan.<sup>26</sup>

Penolakan terhadap undang-undang asas tunggal Pancasila ini kemudian berlanjut dengan perlawanan terhadap pemerintah oleh kelompok Islam yang terjadi di daerah Tanjung Priok. Perlawanan tersebut dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan yang pada akhirnya memakan korban ratusan jiwa. Beberapa kelompok Islam melakukan balas dendam terhadap aksi ini dengan berbagai aksi teror yang kemudian dibalas lagi oleh aparat keamanan dengan aksi represif menangkap para tokoh oposisi Islam dari berbagai kelompok, termasuk DI. Situasi represif ini membuat Abdullah Sungkar dan anggota DI lainnya memutuskan untuk melakukan *hijrah* ke Malaysia pada tahun 1985.<sup>27</sup> Ketika melakukan hijrah inilah, Sungkar dan anggota DI lainnya mulai terlibat dalam situasi internasional yang menjadi fasilitator bagi perkembangan gerakan Islam mereka di Indonesia nantinya.

Beberapa studi menyatakan bahwa kondisi represi politik yang dihasilkan dari entitas politik yang supresif merupakan salah satu permasalahan struktural yang berperan dalam menimbulkan terorisme di suatu negara. Menurut L. Ali Khan, entitas supresif merupakan

---

<sup>24</sup> Basuki Wibowo, "Sikap NU terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal pada Masa Orde Baru," *Paramita*, Vol.19 No.2, (2009), 152-165, hlm. 161

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 159, 162

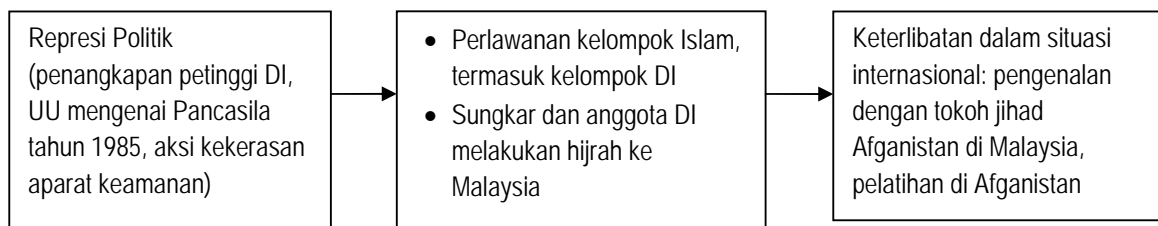
<sup>26</sup> Solahudin, *Op.Cit.*, hlm. 4

<sup>27</sup> Hijrah dianggap sebagai prasyarat sebuah kemenangan politik dengan mempercayai kemenangan (*futtuh*) Mekkah pada masa Nabi Muhammad berhasil diraih setelah hijrah ke Madinah dan membangun daerah basis di sana. Pengikut DI terinspirasi oleh kepercayaan tersebut dan menganggap hijrah sebagai salah satu strategi ketika sedang berada di bawah tekanan dan sebagai kesempatan untuk membangun daerah basis di wilayah lain. Selengkapnya mengenai hijrah dalam Solahudin, *Ibid.*, hlm. 5; kutipan mengenai hijrah Abdullah Sungkar ke Malaysia dalam Solahudin, *Ibid.* dan Asep Chaerudin, *Op.Cit.*, hlm. 30

sumber dari segala kumpulan ketidakpuasan masyarakat. Entitas supresif ini secara simultan menyebabkan dan mengabaikan ketidakpuasan masyarakat targetnya.<sup>28</sup> Karin von Hippel juga menyatakan bahwa negara otoriter yang kuat (sebagai representasi sebuah entitas supresif) yang tidak demokratis dan kurang akuntabilitasnya dapat menjadi ladang subur bagi perkembangan terorisme internasional.<sup>29</sup>

Pada masa Orde Baru, kondisi domestik berupa represi politik telah menjadi faktor struktural bagi kemunculan terorisme. Berbagai tindakan represi, khususnya pemberlakuan asas tunggal Pancasila serta yang melibatkan aksi kekerasan aparat keamanan di bawah rezim Orde Baru yang menindas gerakan-gerakan politik kelompok Islam seperti DI menjadi sumber kebencian DI terhadap pemerintah dan mendorong anggota kelompok DI seperti Sungkar untuk terlibat dalam situasi internasional yang pada perkembangannya menjadi fasilitator sumber motivasi bagi perkembangan gerakan Islam mereka di Indonesia.

**Diagram 1. Faktor Struktural: Kondisi Domestik Masa Orde Baru**



---

<sup>28</sup>L. Ali Khan, *A Theory of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy*, (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 93

<sup>29</sup> Karin von Hippel, "Responding to the Roots of Terror," dalam Magnus Ranstorp, *Op.Cit.*, hlm. 102

#### 4.2 Faktor Fasilitator dan Motivasional: Situasi Internasional Masa Orde Baru

Selain kondisi domestik, situasi internasional pada masa Orde Baru juga menjadi faktor yang berperan dalam penyebab munculnya gerakan terorisme di Indonesia. Sejak tahun 1970-an, beberapa situasi internasional menjadi elemen yang melengkapi faktor domestik dalam perkembangan gerakan terorisme di Indonesia. Pada tahun 1979 misalnya, revolusi yang terjadi di Iran telah menimbulkan efek yang cukup signifikan bagi banyak kaum muda Indonesia yang melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah bukti bahwa Muslim mampu menjatuhkan rezim kuat dan represif yang didukung oleh Barat dan menggantinya dengan sistem politik ekonomi Islam.<sup>30</sup>

Selain itu, situasi internasional yang paling signifikan dalam munculnya aksi-aksi terorisme, khususnya di Indonesia adalah perkembangan salafy jihadi, khususnya di Afganistan tahun 1980-an. Pada saat itu, Uni Soviet melakukan invansi ke Afganistan dan terjadilah perang antara mujahidin (pejuang Perang Suci) Afganistan dengan tentara Uni Soviet.<sup>31</sup> Di sinilah doktrin-doktrin salafy jihadi kemudian lahir dengan bantuan tokoh seperti Abdullah Azzam untuk membangkitkan semangat mujahidin Afganistan mengusir penjajah (Uni Soviet pada waktu itu) dari tanah mereka. Doktrin-doktrin tersebut berisikan perintah bahwa setiap muslim wajib untuk melakukan jihad melawan kafir yang menduduki tanah muslimin dan membenarkan aksi terorisme dalam jihad.<sup>32</sup> Pada masa Orde Baru, untuk menghindari dari represi pemerintahan Soeharto, Abdullah Sungkar dan anggota-anggota DI lainnya melakukan hijrah ke Malaysia. Di sana Sungkar berhasil membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh jihad yang berasal dari Afganistan seperti Syaikh Abdullah Azzam, tokoh yang berperan penting dalam merumuskan doktrin salafy jihadi di Afganistan dan Syaikh Rasul Sayyaf.<sup>33</sup> Pada momen inilah keterkaitan antara Sungkar dan anggota DI lainnya dengan apa yang terjadi di Afganistan mulai terbentuk.

Ketika Sungkar dan anggota-anggota DI lainnya berada di Malaysia, mereka membangun kerjasama dengan tokoh jihad dari Afganistan untuk melakukan pengiriman para

---

<sup>30</sup> Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Local Jihad: Radical Islam and terrorism in Indonesia*, (Australia: The Australian Strategic Policy Institute Limited, 2005), hlm. 18

<sup>31</sup> Solahudin, *Op. Cit.* hlm. 2

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 5

kader DI ke Afganistan. Mereka dikirim dengan tujuan untuk belajar ilmu kemiliteran dari akademi militer di sana yang kemudian akan digunakan sebagai bekal melakukan jihad di Indonesia.<sup>34</sup> Pada periode tahun 1985-1991, mulailah ratusan kader DI terlibat dalam pelatihan di beberapa akademi militer yang ada di Afganistan. Para kader DI ini bukanlah satu-satunya yang berangkat ke Afganistan sebagai mujahidin. Abdullah Azzam, dengan dibantu oleh seorang pemuda Arab Saudi bernama Usamah bin Laden sebelumnya memang telah mendirikan Maktab Al Khidmat, sebuah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi para mujahidin-mujahidin asing dari berbagai negara untuk datang ke Afganistan dan mengikuti program pelatihan militer serta program jihad bersama mujahidin Afganistan.<sup>35</sup>

Dengan perkembangan salafy jihadi di Afganistan, para kader DI yang menjadi mujahidin ini tidak hanya mempelajari ilmu militer, namun juga ilmu agama dengan doktrin-doktrin salafy jihadi tersebut. Kamp pelatihan militer seperti Muaskar Saada pimpinan Abdullah Azzam dan Harby Pohantum Al Ittihad Al Islamy pimpinan Syaikh Abdur Rasul Sayyaf dibangun bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu kemiliteran, namun juga untuk menjadi tempat para mujahidin asing diajarkan doktrin-doktrin salafy jihadi.<sup>36</sup> Pengenalan dan penanaman doktrin salafy jihadi ini menjadi faktor motivasional bagi para kader DI yang belajar di Afganistan. Salafy jihadi memberikan pemahaman keagamaan baru yang mengoreksi pemahaman lama mereka yang diperoleh dari DI, seperti misalnya tauhid RMU (Rububiyah, Mulkiyah dan Uluhiyah).<sup>37</sup> Para kader DI tersebut kemudian meninggalkan tauhid RMU dan mengadopsi doktrin tauhid versi salafy jihadi.<sup>38</sup> Pada perkembangannya, Salafy jihadi ini nantinya juga akan menjadi ideologi utama bagi para kader DI alumni Afganistan ketika mereka membentuk kelompok baru Jemaah Islamiyah (JI).

Dari ulasan mengenai situasi internasional tempat Sungkar dan anggota-anggota DI terlibat, dapat dikemukakan beberapa poin bagaimana situasi pelatihan militer di Afganistan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>37</sup> Tauhid RMU merupakan sebuah materi pembinaan yang disusun oleh Aceng Kurnia, salah satu petinggi DI mantan komandan ajudan Kartosuwirjo. Dalam tauhid ini disebutkan bahwa hak untuk memerintah dan menciptakan undang-undang ada di tangan Allah, dan Barangsiapa yang melanggar hak tersebut dinyatakan kafir dan wajib diperangi. Dikutip dari *Ibid.*, hlm. 4

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 6

semasa Perang Afganistan berkontribusi sebagai faktor penyebab terorisme, khususnya sebagai fasilitator dan juga motivasional. Menurut Bjørge, yang digolongkan sebagai faktor fasilitator atau akselerator adalah faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Situasi internasional pada masa Orde Baru, dalam kasus ini adalah perkembangan salafy jihadi serta aktivitas pelatihan militer yang terjadi di Afganistan memberikan kesempatan bagi Sungkar dan para kader DI untuk mendapatkan ilmu baru, yakni ilmu kemiliteran, serta ilmu agama berupa doktrin-doktrin salafy jihadi. Ilmu kemiliteran dari akademi-akademi militer Afganistan yang memang dibangun untuk para mujahidin asing selama masa Perang Afganistan memberikan bekal bagi para kader DI mengenai bagaimana berperang sebagai tentara serta kemampuan yang terkait dengan aksi terorisme seperti pembuatan bom dan menjalankan operasi rahasia. Kemampuan yang mereka dapatkan ini menjadi fasilitator dalam perkembangan gerakan para kader kelompok radikal Islam di Indonesia dalam melakukan aksi terorisme di kemudian hari.

Greg Fealy dan Aldo Borgu menyebutkan bahwa pengiriman kader DI ke Afganistan yang mereka sebut sebagai “*mujahidin-isation*” telah meningkatkan kapabilitas kelompok radikal Islam di Indonesia untuk melakukan kampanye teror. Kontak dengan Afganistan ini juga disebutkan sebagai pembuka hubungan internasional antara kelompok radikal Islam di Indonesia dengan kelompok radikal Islam lainnya dari berbagai penjuru dunia yang memberikan kelompok radikal Islam di Indonesia akses terhadap bantuan pendanaan, bahan-bahan peledak untuk aksi terorisme, ahli-ahli teknis operasi teror serta metode operasi rahasia yang diperoleh dari para veteran Afganistan dan asosiasinya.<sup>39</sup> Menurut Fealy dan Borgu, tanpa adanya pengalaman serta jaringan yang diperoleh dari aktivitas di Afganistan, aksi terorisme di Indonesia seperti Bom Bali tahun 2002 akan sulit untuk dilakukan.<sup>40</sup>

Sedangkan doktrin salafy jihadi yang juga mereka pelajari berperan sebagai faktor motivasional yang pedoman baru bagi para kader DI alumni Afganistan. Setelah mempelajari paham ini, pemahaman atas pratkek keagamaan mereka sebelumnya dikoreksi, khususnya yang terkait dengan pemahaman keagamaan yang dianut petinggi DI lama di Indonesia. Ke depannya, doktrin-doktrin salafy jihadi yang dianut oleh para kader DI alumni Afganistan ini

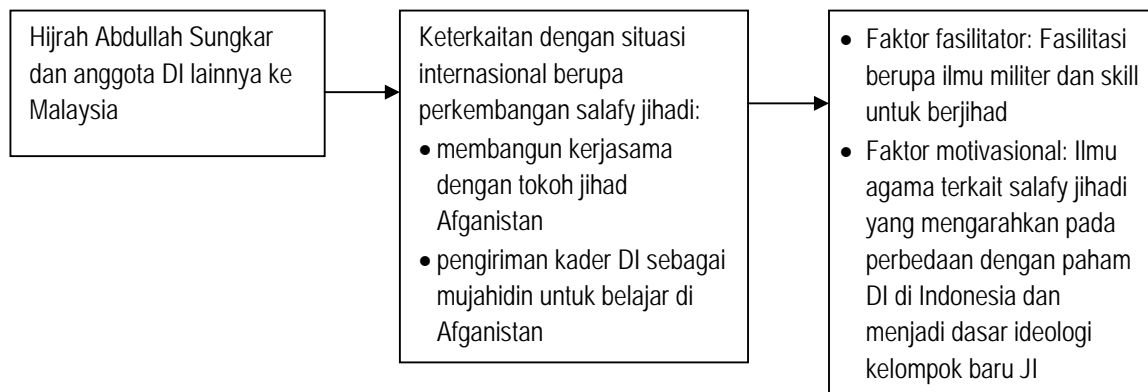
---

<sup>39</sup> Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Op. Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

akan mengawali perkembangan besar dalam tubuh DI yang menjadi cikal bakal terbentuknya JI, kelompok pecahan DI yang anggota-anggotanya beberapa tahun kemudian menjadi aktor dalam rangkaian aksi terorisme mematikan di Indonesia.

**Diagram 2. Faktor Fasilitator dan Motivasional: Situasi Internasional Masa Orde Baru**



#### **4.3 Aksi Terorisme di Indonesia: Faktor Pemicu serta Interaksi antara Kondisi Domesik dan Situasi Internasional Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, kondisi domestik berupa represi politik telah menjadi faktor struktural bagi kemunculan terorisme. Berbagai tindakan represi, khususnya pemberlakuan asas tunggal Pancasila serta yang melibatkan aksi kekerasan aparat keamanan di bawah rezim Orde Baru yang menindas gerakan-gerakan politik kelompok Islam seperti DI menjadi sumber kebencian DI terhadap pemerintah. Selain itu, kondisi domestik ini menjadi faktor penting ketika represi yang dilakukan pemerintah tersebut menekan pergerakan kelompok Islam DI, kondisi tersebut mendorong anggota kelompok DI seperti Sungkar untuk terlibat dalam situasi internasional yang pada perkembangannya menjadi fasilitator dan menyediakan motivasi bagi perkembangan gerakan Islam mereka di Indonesia.

Selanjutnya, ketika Sungkar dan kawan-kawan berada di Malaysia, mereka mulai membangun hubungan dengan tokoh-tokoh jihad internasional, khususnya yang berasal dari Afganistan. Melalui hubungan tersebut, para kader DI mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam perkembangan salafy jihadi dan mengikuti aktivitas pelatihan militer di



Afganistan. Pelatihan militer ini menjadi fasilitator bagi para kader DI dengan didapatkannya ilmu baru, yakni ilmu kemiliteran dan perkembangan salafy jihadi di Afganistan menyediakan motivasi untuk pergerakan berupa doktrin-doktrin salafy jihadi yang nantinya digunakan sebagai bekal melakukan jihad di Indonesia. Kondisi domestik berupa represi pada masa Orde Baru telah berinteraksi dengan situasi internasional di Afganistan dan mengarahkan kelompok DI pada sebuah perkembangan besar dalam tubuh organisasi mereka, yang beberapa tahun kemudian juga berpengaruh terhadap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Setelah mengemban ilmu di Afganistan, para kader DI kembali ke Indonesia dengan membawa bekal ilmu militer dan juga doktrin-doktrin salafy jihadi. Permasalahan mulai muncul ketika para kader DI, yang mempelajari doktrin salafy jihadi dari Afganistan mengkritik pemahaman keagamaan ala DI. Ajengan Masduki, Imam DI yang baru pada waktu itu, dikritik oleh Sungkar telah melakukan praktek keagamaan yang menyimpang.<sup>41</sup> Ajengan Masduki adalah seorang penganut ajaran Thareqat<sup>42</sup> yang menurut paham salafy dianggap sesat, dan Sungkar memperingatkan Ajengan Masduki untuk meninggalkan ajaran tersebut.<sup>43</sup> Permasalahan semakin meruncing ketika murid-murid Sungkar yang merupakan alumni Afganistan juga ikut mengkritik pemahaman keagamaan petinggi DI lama yang dianggap musyrik.<sup>44</sup> Permasalahan perbedaan pandangan atas paham keagamaan tersebut menjadi sumber perselisihan antara Sungkar bersama alumni Afganistan lainnya dengan Ajengan Masduki dan petinggi-petinggi DI lainnya. Perselisihan ini membawa DI pada perkembangan besar di tahun 1990-an, yakni perpecahan kelompok Sungkar dan kawan-kawan dari DI. Pada tahun 1993, Sungkar kemudian mendirikan sebuah kelompok baru dengan pedoman salafy jihadi pertama di Indonesia yang diberi nama Jemaah Islamiyah

---

<sup>41</sup> Solahudin, *Op. Cit.*, hlm. 231

<sup>42</sup> Thareqat merupakan sebuah gerakan atau jalan yang beraliran Sufi dengan ajaran yang berkarakter mistis dan menekankan non-kekerasan dan toleransi. Ajaran thareqat ini dianggap melanggar keyakinan Islam menurut doktrin Wahabi yang mengkategorikan semua bentuk praktek Sufisme adalah sesat. Dikutip dari Blontank Boer, "Tracking the Roots of Jamaah Islamiyah," *The Jakarta Post*, 08 Maret 2003

<sup>43</sup> Solahudin, *Op. Cit.*, hlm. 231-232

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 232

(JI).<sup>45</sup> Kelompok inilah yang oleh pihak kepolisian dikaitkan dengan rangkaian aksi terorisme tahun 2000 hingga 2005 di Indonesia.

Meskipun mengalami perpecahan, pada prinsipnya pengaruh DI masih melekat di JI. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu prinsip perjuangan JI yaitu, “melaksanakan dakwah, *amar ma'ruf nahyi mangkar* dan *jihad fisabilillah*, melalui ja'maah yang gerakannya berdisiplin mengikuti syari'at yang *hanif*, yang tidak berkompromi dan menyimpang, serta mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lalu.”<sup>46</sup> Prinsip tersebut serupa dengan dakwah yang dilakukan DI, menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan (*ma'ruf nahyi mangkar*) yang dicetuskan Kertosuwirjo serta kewajiban untuk berjihad sebagai bagian dari perjuangan yang telah diyakini sejak DI berdiri.<sup>47</sup>

Namun selebihnya JI berbeda dengan DI, khususnya dengan JI yang benar-benar menerapkan doktrin salafy jihadi sebagai dasar gerakannya. Sungkar, pendiri JI menganggap pemahaman imam DI (pada waktu perpecahan) sebagai pemahaman menyimpang dari pemahaman yang dianutnya dan memutuskan untuk membentuk jamaah baru dengan mazhab salafy sebagai doktrin utama yang bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam dengan jalan jihad.<sup>48</sup>

Doktrin salafy jihadi ini menjadi dasar gerakan bagi anggota JI terutama dalam aksi terorisme di Indonesia yang terjadi antara rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2005. Aksi-aksi yang mengawali kesadaran akan bahaya terorisme tersebut antara lain seperti Bom Natal tahun 2000, 81 bom dan 29 peledakan di Jakarta pada tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Bom Marriot tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004 serta Bom Bali II tahun 2005.<sup>49</sup> Pada periode ini kelompok JI menjadi sorotan karena pelaku-pelaku dari aksi-aksi terorisme tersebut, seperti Hambali, Imam Samudera, Ali Imron, Ali Ghufron, Amrozi, Dr. Azahari Husein serta Noordin M. Top merupakan anggota-anggota JI. Aksi-aksi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.235

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 60 dan ICG, “Recycling Militans in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing,” *Crisis Group Asia Report* N° 92, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2005), hlm. 5

<sup>48</sup> Solahudin, *Ibid.*, hlm. 233

<sup>49</sup> Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*

terorisme tersebut dilakukan tidak hanya untuk meneror musuh, namun juga untuk tujuan lebih luas yaitu membuka pintu jihad sebagai kewajiban di jalan Allah melawan kaum kafir.<sup>50</sup> Doktrin Salafy Jihadilah yang dijadikan pedoman oleh para anggota JI tersebut untuk mendasari aksi teror yang mereka lakukan.

Ali Ghufron misalnya, yang bersama Hambali merupakan petinggi Mantiqi I, unit JI yang kemudian menjadi pelopor aksi Bom Bali I tahun 2002, mengakui bahwa dirinya merupakan penganut *jihad as salafyyah* atau salafy jihadi.<sup>51</sup> Hambali, ketua Mantiqi I yang bertanggung jawab atas hampir semua aksi pemboman yang dilakukan JI, merupakan alumni Afganistan di mana salafy jihadi diperkenalkan dan dianut dengan kuat olehnya.<sup>52</sup> Demikian pula dengan Imam Samudra dan Ali Imron yang menjadi dalang di balik aksi Bom Bali I, salafy jihadi juga menjadi ideologi mereka pasca pengalaman yang didapat ketika mereka ikut sebagai mujahidin di Afganistan.<sup>53</sup>

Dengan doktrin salafy jihadi yang melekat pada diri mereka, aksi terorisme sebagai perwujudan jihad pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang menindas Muslim. Seperti pengakuan Imam Samudra, "...jihad adalah jalan Tuhan, dan pengeboman di Bali merupakan bagian dari jihad dari beberapa kaum Muslim untuk melawan para penjajah, Amerika dan sekutunya."<sup>54</sup>

Selain faktor motivasional melalui doktrin-doktrin salafy jihadi, anggota-anggota JI melakukan aksi-aksi terorisme karena dipicu oleh tiga peristiwa spesifik yang terjadi sesaat pasca masa Orde Baru. Pertama adalah konflik komunal di Ambon dan Poso; kedua, fatwa dari tokoh jihad Afganistan, yaitu Usamah bin Laden pada tahun 1998; dan ketiga, peristiwa 9/11 yang meruntuhkan gedung WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001. Konflik komunal di Ambon dan Poso pada tahun 1999-2000 antara komunitas Kristen dan Islam memicu

---

<sup>50</sup> Solahudin, *Op. Cit.*, hlm. 259

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>52</sup> Kumar Ramakhrisna, *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia* (Westport, Conn: Praeger Security International, 2009), hlm. 125

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 111 dan 141

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 112-113

anggota JI untuk memerangi kaum Kristen fanatik yang menyerang Islam. Peristiwa Bom Natal tahun 2000 adalah bentuk aksi perang terhadap umat Kristen tersebut.<sup>55</sup>

Sedangkan pemicu kedua berasal dari fatwa Usamah bin Laden, seorang tokoh jihad yang dikenal anggota JI sejak mereka mengikuti pelatihan militer di Afganistan.<sup>56</sup> Pada tahun 1998 Usamah bin Laden mengeluarkan fatwa untuk berperang melawan Amerika dan sekutunya sebagai kewajiban setiap muslim yang dapat dilakukan di negara manapun bila memungkinkan.<sup>57</sup> Fatwa ini mempengaruhi anggota JI seperti Hambali dan Ali Ghufron untuk segera melakukan aksi jihad melawan Amerika dan sekutunya.<sup>58</sup>

Selain itu, peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok al Qaeda juga pemicu berikutnya bagi Hambali dan anggota Mantiqi I untuk melakukan aksi terorisme. Dengan berhasilnya al Qaeda menyerang Amerika yang disimbolkan dalam serangan 9/11, Hambali dan kawan-kawan semakin yakin untuk melakukan aksi serangan terhadap Amerika dan sekutunya di Asia Tenggara.<sup>59</sup> Sebagai hasilnya, Bom Bali, Bom Marriot serta Bom Kedutaan Besar Australia menjadi bukti dari aksi terorisme Hambali dan kawan-kawan sebagai bentuk jihad melawan kafir.<sup>60</sup>

**Diagram 3. Interaksi Kondisi Domestik dan Situasi Internasional Masa Orde Baru yang Berperan sebagai Penyebab Aksi Terorisme di Indonesia**



<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 262

<sup>60</sup> Terinspirasi oleh fatwa Usamah bin Laden, Hambali dan anggota-anggota JI lainnya melakukan serangkaian pemboman di Indonesiadengan menarget Amerika dan sekutunya (seperti Australia) di lokasi-lokasi yang dipadati dengan warga asing dari negara-negara tersebut seperti Paddy's Cafe dan Sari Club di Bali, Hotel J.W. Marriot serta Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Selengkapnya dalam *Ibid.*, hlm.262-267 dan Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Op. Cit.*, hlm.47-83



## **V. Kesimpulan**

Kondisi domestik represif pada masa Orde Baru telah menjadi faktor struktural yang melandasi kebangkitan gerakan Islam DI dengan aksi kekerasan dan bahkan terorisme sebagai bagian dari jihad mereka. Kelompok ini semakin melakukan perlawanan ketika pemerintah memberlakukan represi politik berupa pemberlakuan asas tunggal Pancasila serta aksi kekerasan aparat keamanan dalam menciduk petinggi-petinggi DI. Kondisi represif ini juga membuat anggota DI melakukan hijrah ke Malaysia dan terlibat dalam situasi internasional di Afganistan.

Keterlibatan di Afganistan pada perkembangannya menyediakan faktor fasilitator dan motivasional bagi gerakan Islam mereka di Indonesia ketika Sungkar dan anggota DI lainnya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam perkembangan salafy jihadi dan mengikuti aktivitas pelatihan militer di Afganistan. Pelatihan militer ini menjadi fasilitator bagi para kader DI dengan didapatkannya ilmu baru, yakni ilmu kemiliteran dan perkembangan salafy jihadi di Afganistan menyediakan motivasi untuk pergerakan berupa doktrin-doktrin salafy jihadi yang nantinya digunakan sebagai bekal melakukan jihad di Indonesia. Hingga pada titik ini, kondisi domestik berupa represi pada masa Orde Baru telah berinteraksi dengan situasi internasional di Afganistan dan mengarahkan kelompok DI pada sebuah perkembangan besar dalam tubuh organisasi mereka, yang pada tahun 1993 pecah dan melahirkan kelompok baru, yakni JI.

Kelompok JI ini menggunakan doktrin salafy jihadi yang didapat melalui pengalaman di Afganistan sebagai dasar pergerakannya. Dengan doktrin-doktrin untuk melakukan jihad yang bermazhab salafy tersebut, serta ilmu militer yang diperoleh selama berada di Afganistan, anggota-anggota kelompok JI kemudian termotivasi untuk melakukan serangkaian aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2000-2005. Adapun faktor pemicu yang pada akhirnya benar-benar mendorong terwujudnya aksi-aksi teror tersebut muncul dari beberapa kejadian spesifik sesaat pasca masa Orde Baru, seperti peristiwa konflik komunal di Ambon dan Poso, fatwa Usamah bin Laden serta peristiwa 9/11.

Dari seluruh rangkaian kondisi domestik dan internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi terorisme di Indonesia, khususnya pada tahun 2000-2005 terjadi karena interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru serta pemicu berupa beberapa kejadian spesifik sesaat setelah rezim Orde Baru berakhir. Kondisi represif pada masa Orde Baru menyebabkan kelompok DI untuk bangkit serta terlibat dalam situasi

internasional di Afganistan dan memperkenalkan doktrin salafy jihadi pada anggota kelompok tersebut. Melalui doktrin salafy jihadi, anggota DI alumni Afganistan memecahkan diri dari DI dan membentuk JI. Setelah membentuk JI, dengan berpedoman pada salafy jihadi, berbekal ilmu militer serta dipicu oleh beberapa kejadian spesifik, anggota-anggota JI kemudian memutuskan untuk melaksanakan jihad berupa serangkaian aksi terorisme di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Alonso, Rogelio, et.al. *Radicalisation Processes: Leading to Acts of Terrorism*, (European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation, 2008)

Boer, Blontank. "Tracking the Roots of Jamaah Islamiyah," *The Jakarta Post*, 08 Maret 2003

Bonlai, Rommel C. "The War on Terrorism in Southeast Asia," 2003, dalam Chaerudin, Asep "Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines," *Tesis*, (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003)

Djelantik, Sukawarsini "Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorists." *International Graduate Student Conference Series*, No. 22, (East-West Center, 2006)

Kaplan, Eben dan Bajoria, Jayshree. "Counterterrorism in India," Council on Foreign Relations, 2008, diunduh dari <http://www.cfr.org/india/counterterrorism-india/p11170>, diakses pada tanggal 19 November 2012

Fealy, Greg dan Borgu, Aldo. *Local Jihad: Radical Islam and terrorism in Indonesia*, (Australia: The Australian Strategic Policy Institute Limited, 2005)

ICG, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia," *Indonesia Briefing*, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2002)

ICG, "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates," *Asia Report* N°43, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2002)

ICG, "Recycling Militans in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing," *Crisis Group Asia Report* N° 92, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2005)

Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) dan Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), "Security Cooperation and Governance in Southeast Asia: Responding to Terrorism, Insurgency and Separatist Violence in Indonesia, Thailand and the Philippines," *Conference Report*, (Singapore, 2006)

Khan, L. Ali. *A Theory of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy*, (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2006)

Lutz, James M. dan Lutz, Brenda J. *Global Terrorism*, (London: Routledge, 2004)



Ramakhrisna, Kumar & See Seng Tan, "Is Southeast Asia a "Terrorist Haven"?" dalam Ramakhrisna, Kumar & See Seng Tan, eds., *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, (Singapore: World Scientific/IDSS, 2002)

Ramakhrisna, Kumar. *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia* (Westport, Conn: Praeger Security International, 2009)

Riza, Achmad Kemal. "Responses of Islamic Organisations to the Enactment of Pancasila as Asas Tunggal for Mass Organisations in Indonesia," *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, (2008), 374-394

Silber, Mitchell D. dan Bhatt, Arvin. *Radicalization in the West*, (NYPD, 2007)

Sinai, Joshua. "New Trends in Terrorism Studies: Strengths and Weakness," dalam Ranstorp, Magnus. *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, (New York: Routledge, 2007)

Solahudin, *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011)

Tore Bjorgø (ed.), *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward* (London and New York: Routledge, 2005)

Wardhani, Artanti. *Modul Pengajaran Mata Kuliah Terorisme di Indonesia*, (Universitas Indonesia, 2011)

Wibowo, Basuki. "Sikap NU terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal pada Masa Orde Baru," *Paramita*, Vol.19 No.2, (2009), 152-165

Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007)